

Strategi Pengembangan Cagar Budaya Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi

Irza Ramadani¹ Herdi Salioso²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia.

irzaramadani@student.uir.ac.id herdisalioso@soc.uir.ac.id

Received : 14 Juni 2025

Abstract

The development strategy of cultural heritage is an essential step in preserving historical legacy in Kuantan Singingi Regency. This study aims to identify the development strategies implemented by the Department of Culture and Tourism of Kuantan Singingi Regency. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation from informants directly involved in the field of culture and tourism. The findings indicate that the strategies implemented include programs for physical preservation of cultural heritage, promotion through cultural events, and public education on historical values. However, the implementation of these strategies is still hindered by budget constraints, low public awareness, and lack of inter-institutional collaboration. In conclusion, the strategies are on the right track but need to be strengthened through better resource support and institutional synergy.

Keywords: Strategy, Cultural Heritage, Preservation

Abstrak

Strategi pengembangan cagar budaya menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian warisan sejarah di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan cagar budaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terkait langsung dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi program pelestarian fisik cagar budaya, promosi melalui event budaya, serta edukasi masyarakat tentang nilai sejarah. Namun, pelaksanaan strategi masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga. Kesimpulannya, strategi yang diterapkan sudah berada pada jalur yang tepat namun perlu diperkuat melalui dukungan sumber daya dan sinergi yang lebih baik.

Kata Kunci: Strategi, Cagar Budaya, Pelestarian

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi. Letak geografis Indonesia yang mendukung keindahan alamnya serta banyaknya kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia inilah yang banyak menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Wisata budaya menjadi salah satu wisata yang harus dikembangkan dengan tujuan untuk melestarikan suatu kebudayaan, kemudian warisan budaya juga sangat berdampak pada bidang ekonomi dan pariwisata. Salah satunya adalah benda-benda peninggalan sejarah kebudayaan yang kini sudah banyak dijadikan sebagai destinasi wisata.

Peninggalan benda cagar budaya pada hakikatnya harus dijaga dan di akui keberadaannya, Masyarakat menyebutnya dengan berbagai macam sebutan antara lain benda kuno, benda antik, benda purbakala, monumen, peninggalan arkeologi, atau peninggalan sejarah. Cagar budaya di Indonesia adalah warisan sejarah yang sangat penting dalam membentuk identitas bangsa.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

Strategi pengembangan cagar budaya merupakan langkah penting dalam upaya pelestarian warisan sejarah di Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten ini memiliki kekayaan budaya yang signifikan, dengan data tahun 2020 mencatat sebanyak 158 objek cagar budaya dan yang diduga cagar budaya tersebar di berbagai kecamatan . Salah satu contoh adalah Desa Koto Sentajo, yang dikenal sebagai desa adat dengan 24 unit Rumah Godang, menjadikannya sebagai ikon budaya yang penting di wilayah tersebut.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran strategis dalam pelestarian Cagar Budaya Istana Koto Rajo yang terletak di Desa Koto Rajo, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, dinas ini bertanggung jawab dalam menyusun data base cagar budaya, memantau dan mengevaluasi kegiatan pelestarian, serta menyelenggarakan pembinaan dan pendukung pengelolaan cagar budaya. Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas ini juga melakukan pendataan terhadap cagar-cagar budaya dan benda sejarah di seluruh kecamatan, termasuk Istana Koto Rajo, sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi.

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam pelestarian Istano Koto Rajo, seperti kerusakan fisik bangunan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran, mencerminkan perlunya pendekatan pelestarian yang holistik dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian cagar budaya mencakup tiga kegiatan utama: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Perlindungan bertujuan mencegah kerusakan dan kehancuran cagar budaya, pengembangan menjaga kualitas penampilan agar dapat difungsikan sesuai ketentuan, dan pemanfaatan memberikan kegunaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun kebudayaan. Dalam konteks Istano Koto Rajo, pendekatan pelestarian berbasis masyarakat menjadi relevan, di mana pelibatan aktif masyarakat dalam pelestarian dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap cagar budaya. Strategi ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menciptakan

suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (enabling), memperkuat potensi yang dimiliki (empowering), dan melindungi cagar budaya melalui partisipasi aktif. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal

menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pelestarian Istano Koto Rajo sebagai warisan budaya yang berharga.

Namun, pelestarian cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan anggaran. Meskipun APBD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025 disahkan sebesar Rp1,733 triliun, alokasi khusus untuk kegiatan pelestarian cagar budaya belum dirinci secara jelas dalam dokumen tersebut.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Dr. Sondang Siagian (2012) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ali Faried (2011) Secara terminologi apa yang disebut administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apa lagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administrasi dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia kerja, anda pasti sudah tidak asing dengan istilah administrasi. Kata ini sering dijumpai dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan administrasi itu sendiri.

Konsep Organisasi

Winardi (2003, hal 20) menyatakan bahwa, organisasi tidak hanya diartikan sebagai wujud saja tetapi juga sebagai proses interaksi berbagai pihak. Kontrak atau perjanjian yang membentuk organisasi ini sendiri terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Sport Contract
2. Relational Contract

Konsep Manajemen

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2001) adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut Handyaningrat (1996) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Konsep Strategi

Strategi adalah suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya (Ruslan 2007). Menurut Porter (Rangkuti 2004) strategi adalah suatu alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Senada dengan itu, Hamel dan Phalarad (Rangkuti, 2004:4) juga mengatakan strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan.

Konspe Pengembangan

Menurut Sugiyono (2015:5) menyebutkan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Menurut National Science Board yang dikutip oleh Putra (2011:70) mendefinisikan pengembangan sebagai aplikasi sistematis dari pengetahuan atau pemahaman yang diarahkan pada produksi barang yang bermanfaat.

Konsep Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan menurut Cooper dkk dalam Sunaryo (2013: 159) menjelaskan bahwa:

1. Menurut Cooper, *Attraction* dalam konteks pariwisata merujuk pada daya tarik yang dimiliki suatu lokasi atau destinasi yang menjadikannya menarik bagi pengunjung.
2. Menurut Cooper, *Accessibility* merujuk pada sejauh mana suatu destinasi atau objek wisata dapat dijangkau dan diakses oleh pengunjung. Ini mencakup berbagai faktor, seperti infrastruktur transportasi, kualitas jalan, dan kemudahan navigasi di dalam area tersebut.
3. Menurut Cooper, *Amenities* merujuk pada fasilitas dan layanan tambahan yang tersedia di suatu destinasi wisata yang meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengunjung.
4. Menurut Cooper, *Ancillary services* merujuk pada layanan tambahan yang mendukung pengalaman wisatawan di destinasi tertentu, di luar atraksi utama dan fasilitas dasar. Layanan ini mencakup berbagai aspek, seperti pemandu wisata, transportasi local.
5. Menurut Cooper, *Institution* merujuk pada struktur organisasi dan sistem yang mendukung pengelolaan dan pengembangan industri pariwisata di suatu destinasi. Ini mencakup berbagai entitas, seperti pemerintah, lembaga swasta, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah yang berperan dalam perencanaan, regulasi, dan promosi pariwisata.

Konsep Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda cagar budaya benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya,

atau sisa- sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap (Andri 2019).

Konsep Kebudayaan

Menurut Dr.Moh Hatta Berpendapat Kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa.Menurut Djojodigono (1958) kebudayaan dengan mengatakan kebudayaan itu adalah daya dari budi, yang berupa cipta, karsa dan rasa.

Menurut Nostrand (1989) mendefinisikan budaya sebagai sikap dan kepercayaan, cara berpikir, berperilaku, dan mengingat bersama oleh anggota komunitas tersebut.

Konsep Pariwisata

Pariwisata berasal dari dua kata, yakni Pari dan Wisata.Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "travel" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata "Pariwisata" dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan "Tour".Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Konsep Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Dinas Pariwisata Provinsi Riau bertolak pada visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Riau, Pembangunan Pariwisata masuk pada Misi ke-4 yaitu Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. Upaya dalam mencapai misi ini akan dicapai dengan tujuan : Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah dengan indikator Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, sasaran yang dituju adalah Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Meningkatkan Kenyamanan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Riau.

Metode

Penelitian kualitatif berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Moleong 2012). Penggalan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam peneltian, selain itu melakukan observasi langsung mengenai objek penelitian. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya- upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan- pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai

dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan subjek ataupun objek penelitian (Sugiyono, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian sekaligus juga pembahasan mengenai dari tanggapan informen penelitian tentang Strategi Pengembangan Cagar Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk pembahasan yang lebih jelas mengenai hasil dan pembahasan penelitian dapat dilihat seperti berikut :

1. *Attraction* (Daya Tarik)

Mengacu pada teori strategi pengembangan menurut Cooper, Atraksi (*attraction*) adalah bentuk kegiatan budaya, keindahan alam dan event yang memotivasi wisatawan untuk datang berkunjung.

a. Keberagaman Cagar Budaya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu mengembangkan strategi yang berfokus pada pelestarian dan promosi cagar budaya ini, termasuk penyediaan informasi yang memadai bagi wisatawan dan peningkatan aksesibilitas ke lokasi- lokasi tersebut. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan promosi cagar budaya sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan strategi pengembangan. Pembangunan infrastruktur yang mendukung akses ke cagar budaya akan meningkatkan pengalaman wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, keberagaman cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi harus dikelola dengan baik untuk memaksimalkan potensinya sebagai daya tarik wisata. Dengan demikian, keberagaman cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi harus dikelola dengan baik untuk memaksimalkan potensinya sebagai daya tarik wisata.

b. Kondisi Fisik Cagar Budaya

Dalam penelitian ini sebagian besar cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan kondisi fisik yang disebabkan oleh faktor usia, cuaca, dan kurangnya pemeliharaan. Kondisi fisik yang kurang terawat dapat mengurangi daya tarik bagi wisatawan, yang berdampak negatif pada kunjungan dan minat terhadap cagar budaya tersebut. Diperlukan investasi yang cukup dalam pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur pendukung untuk memastikan cagar budaya tetap dalam kondisi baik dan menarik bagi pengunjung. Dengan demikian, perhatian terhadap kondisi fisik cagar budaya sangat penting untuk meningkatkan daya tarik dan mendukung strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. *Accesability* (Aksesibilitas)

Mengacu pada teori Cooper, *Accessibility* (Aksesibilitas) adalah unsur yang disamakan dengan kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata harus maka dilengkapi dengan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut mudah untuk dikunjungi.

a. **Infrastruktur Transportasi**

Akses yang terbatas dapat mengurangi jumlah pengunjung dan menghambat pengembangan pariwisata di daerah tersebut, sehingga potensi cagar budaya tidak dapat dimaksimalkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu merencanakan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih baik, termasuk peningkatan jalan, penyediaan transportasi umum, dan penanda arah yang jelas.

Kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan memastikan akses yang lebih baik ke cagar budaya. Peningkatan aksesibilitas melalui infrastruktur transportasi yang baik dapat berdampak positif terhadap perekonomian lokal, dengan meningkatkan kunjungan wisatawan dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai sangat krusial untuk meningkatkan aksesibilitas cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi dan mendukung strategi pengembangan pariwisata.

b. **Petunjuk arah dan transportasi**

Dalam penelitian ini Petunjuk arah menuju cagar budaya masih terbatas, yang menyulitkan wisatawan dalam menemukan lokasi-lokasi penting. Hal ini dapat mengurangi pengalaman pengunjung. Sarana transportasi yang tersedia belum sepenuhnya mendukung aksesibilitas, sehingga wisatawan sering menghadapi kesulitan dalam menjangkau cagar budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu meningkatkan penyediaan petunjuk arah yang jelas dan informatif, baik secara fisik maupun digital, untuk memudahkan wisatawan.

3. *Amenities* (Sarana dan Prasarana)

Mengacu pada teori Cooper *amenity* merupakan sarana dan prasarana yang ada di sebuah objek wisata yang terdiri dari akomodasi, dan layanan.

a. **Fasilitas Pengunjung**

Dalam penelitian ini fasilitas pengunjung, seperti toilet, tempat istirahat, dan area parkir, masih terbatas di beberapa lokasi cagar budaya, yang dapat mengurangi kenyamanan pengunjung. Kualitas fasilitas yang kurang memadai dapat mengganggu pengalaman wisatawan, sehingga perlu perhatian lebih untuk meningkatkan pelayanan. Peningkatan kualitas layanan di fasilitas pengunjung, termasuk informasi dan bantuan, sangat penting untuk memberikan pengalaman yang positif. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus merencanakan pengembangan infrastruktur yang mendukung kenyamanan pengunjung, seperti penyediaan tempat makan dan informasi yang mudah diakses.

Dengan memperbaiki fasilitas, diharapkan jumlah kunjungan dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian cagar budaya. Dengan demikian, peningkatan fasilitas pengunjung sangat krusial untuk menciptakan pengalaman wisata yang memuaskan dan mendukung strategi pengembangan cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Layanan Keamanan

Dalam penelitian layanan keamanan yang memadai sangat penting untuk melindungi cagar budaya dan memberikan rasa aman kepada pengunjung. Saat ini, kualitas layanan keamanan di beberapa lokasi cagar budaya masih perlu ditingkatkan, dengan kurangnya personel dan prosedur yang jelas. Diperlukan pelatihan bagi staf keamanan untuk memastikan mereka mampu menangani situasi darurat dan memberikan informasi yang tepat kepada pengunjung. Kerjasama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk meningkatkan keamanan di area cagar budaya. Kerjasama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk meningkatkan keamanan di area cagar budaya.

4. *Ancillary* (Layanan Tambahan)

Mengacu pada teori Cooper, *Ancillary* pada pariwisata merupakan ujung tombak bagi kelancaran suatu tempat wisata. *Ancillary* merupakan organisasi yang mengurus suatu destinasi wisata mulai dari pemasarannya hingga pelayanan agar dapat berjalannya lancar dan baik.

a. Pemandu Wisata

Dalam penelitian ini Pemandu wisata memiliki peran penting dalam memperkaya pengalaman pengunjung melalui penyampaian informasi yang akurat dan menarik tentang cagar budaya. Kualitas pemandu wisata masih bervariasi, dengan beberapa pemandu yang kurang terlatih dalam memberikan penjelasan yang mendalam dan menarik. Kualitas pemandu wisata masih bervariasi, dengan beberapa pemandu yang kurang terlatih dalam memberikan penjelasan yang mendalam dan menarik.

b. Transportasi Lokal

Dalam penelitian ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pelestarian cagar budaya melalui program edukasi yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap warisan budaya lokal, serta memastikan keberlanjutan pelestariannya di masa mendatang.

5. *Institutions* (Kelembagaan)

Mengacu pada teori Cooper, Kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas norma, nilai, aturan, dan perilaku yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat.

a. Kepemimpinan dan Manajemen

Kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat penting dalam mengarahkan strategi pengembangan cagar budaya dan memastikan pelaksanaan program yang efektif. Manajemen sumber daya yang baik, termasuk dalam hal anggaran dan tenaga kerja, diperlukan untuk mendukung kegiatan pelestarian dan promosi cagar budaya. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan analisis yang tepat akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola cagar budaya dan staf manajemen sangat penting untuk meningkatkan efektivitas operasional.

b. Regulasi dan Kebijakan

Dalam penelitian ini Layanan keamanan yang memadai sangat penting untuk melindungi cagar budaya dan memberikan rasa aman kepada pengunjung. Saat ini, kualitas layanan keamanan di beberapa lokasi cagar budaya masih perlu ditingkatkan, dengan kurangnya personel dan prosedur yang jelas. Diperlukan pelatihan bagi staf keamanan untuk memastikan mereka mampu menangani situasi darurat dan memberikan informasi yang tepat kepada pengunjung. Kerjasama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk meningkatkan keamanan di area cagar budaya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi telah terlaksana melalui berbagai program seperti pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pengembangan kebudayaan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dinas juga menjalankan fungsi koordinasi, promosi, serta pembinaan kelompok seni dan budaya dalam mendukung pelestarian warisan budaya. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, hasil yang dicapai masih belum optimal karena adanya tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberlanjutan pelestarian dan pengembangan cagar budaya sebagai bagian penting dari identitas dan potensi pariwisata daerah.

Daftar Pustaka**Buku dan Jurnal**

- Andri S. 2019. Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Cagar Budaya di Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi. Pekanbaru : Universitas Islam Riau.
- Anwar Arifin, Strategi Komunikasi (Bandung: Amrico, 1984). Hlm 59
- Abdillah, J. (2020). Analisis Peran Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(2), 187–191. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2909>

Irza Ramadani dan Herdi Salioso

- Cooper. (2000). *Tourism Management Special Issue : The Competitive Destination*.
- Kusuma, S. E., & Fridayani, J. A. (2022). *Institusi dan Organisasi Pengenalan, Identifikasi, dan Analisis Dasar*. Sanata Dharma University Press.
- Meliantari, D., & Apriani. (2024). The Link of Amenities, Accessibility and Ancillary with the Selection of Tourist Destinations. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 93–102.
- Permadi, Akhyar, R. W., & Oktaryani, G. (2021). Identifikasi Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas dan Ancilliary Twagunung Tunak Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah. *Prosiding Siaintek*, 3, 12–20.
- Safitri, E. (2021). Identifikasi Tipologi Bangunan Tradisional di Kenegerian Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer*, 4(1), 598–611.
- Soedjono, M. R. (2020). *IDENTIFIKASI VISUAL KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KAMPUNG PENELEH, KOTA SURABAYA*.
- Sofyan, A. M., & Noor, A. A. (2016). Perancangan Konten Aplikasi Travel Guide Berbasis Android Menggunakan Identifikasi Komponen Pariwisata 6 (Enam) A. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 7(1), 161–166.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, Y. I., & Saraswati. (2021). Identifikasi Kelayakan Obyek Wisata Alam Dengan Pendekatan 4A (Attraction, Amenity, Accesibility, Dan Ancilliary). *Jurnal Arsitektur Kolaborasi*, 1(2), 36–53.
- Ulya, N. (2023). *Analisis Konsep 4A (Attraction, Amenity, Accesibility, dan Ancilliary) Dalam Pengembangan Wisata Religi Makam Ki Ageng Pandanaran di Kota Semarang*.
- Wibowo, M. S., Paninggiran, H. N. K., & Heptanti, U. (2023). Analisisaya Tarik Wisata Dan Pengelolaan Destinasi Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal. *urnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 6(2), 608–616. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i2.59695>
- Agus, A., & Nyoman, N. (2015). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pariwisata*, 10(2), 60-75
- Gamal Suwanto. (1997). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset
- Johar Arifin. (2016). *Pariwisata dan Budaya: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marhadi, R. (2017). *Pacu Jalur: Tradisi dan Pengembangan Wisata Budaya di Riau*. Teluk
- Kuantan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi
- Sammeng, A. (2001). *Manajemen Destinasi Pariwisata*. Bandung: Alfabetat
- Susrianto, H. (2019). Strategi Promosi Cagar Budaya di Kabuaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 22-30.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1),

77-87.

- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of Irza Ramadani dan Herdi Salioso

- collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.

- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.

- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in

Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In
- Irza Ramadani dan Herdi Salioso

Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.

Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.

Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.

Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.

TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.

Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).

Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD: "Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.

Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.

Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.

Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.

Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.

Dr. Iwan Satibi, Ms. (2012). *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*.

Unpas Press, 22-25. Diambil dari

<http://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/480>

Irza Ramadani dan Herdi Salioso

- Dunn, W. N. (2000). pengantar analisis kebijakan. yogyakarta: gadjah mada university press.
- Dye, T. R. (1978). understanding public policy. Englewood cliffs. NJ: prentice-hall, inc.
- Ellitan, L. dan L. A. (2009). manajemen inovasi transformasi menuju organisasi kelas dunia. bandung: alfabeta.
- Epa, N., Lukman, S., & Wargadinata, E. (2020). Dalam penerapan, 11(4).
- Friedrickson dan Hart. (2003). kebijakan publik dan reformasi. jakarta: sinar harapan.
- Gertson, L. N. (2002). public policy making in a democratic society. armonk: M.E Sharpe.
- Halvorsen, T. et al. (2005). on the differences between public and private sector innovations. oslo: Publin report.
- Handrian, E. (2023). buku ajar kebijakan publik. pekanbaru: UIR Press.
- Heeks, R. (2001). Understanding e-Governance for Development. Institute for Development Policy and Management.
- Hendrayady, A., Arman, Djati, S. N., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., ... Razak, M. R. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Birokrasi Administrasi.
- Henry, N. (1995). public administration and public affairs (sixth). new jersey: practise hall.
- Hughes, O. E. (1994). public management & administration : an introduction. london: the macmillan press ltd.
- Ibrahim, A. (2008). teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya. bandung: mandar maju.
- Indrajit, R. E., Zainudin, A., & Rudianto, D. (2019). Electronic government in action. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1–272. Diambil dari <https://www.academia.edu/download/50613264/Preinexus-TeknikSearchingEfektifDuniaPendidikan.pdf>
- Indrayani, E. (2020). E-Government : Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan cendekia.
- Irianto, J. (2001). manajemen sumber daya manusia. surabaya: insan cendekia.
- Jaelani. (2021). teori organisasi. semarang: yayasan prima agus teknik.
- Jenskin, W. J. (1978). policy analysis : a political and organizational perspective. london: martin robertson.
- Keban, Y. (2008). enam dimensi strategis administrasi publik : konsep, teori dan isu. yogyakarta: gava media.
- Kurniawan, A. (2005). Transformasi pelayanan publik. yogyakarta: pembaruan.
- Mahmudi. (2007). manajemen kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Makmur, Helen dan Thahier, R. (2015). inovasi dan kreativitas manusia. bandung: PT refika aditama.

- Malawat, S. (2022). Buku Pengantar Administrasi Publik. Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik. Diambil dari http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku_pengantar_administrasi_publik.pdf
- Maulana, N. 201. (2019). Delly Maulana Buku FULL.
- Moenir. (2003). manajemen pelayanan umum di indonesia. jakarta: bumi aksara.
- Mulyadi, D. et al. (2018). administrasi publik untuk pelayanan publik. bandung: alfabeta.
- Musa, M. R. (2010). An e-readiness Assessment Tool for Local Authorities : A Pilot Application to Iraq, (May), 147. Diambil dari <http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/713/2010ppadmohammedmusa.pdf?sequence=1>
- Nento, F., Nugroho, L. E., & Selo. (2017a). Model E-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Smart Government : Studi Kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo. Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri (SENIATI), B27.1-6.
- Nento, F., Nugroho, L. E., & Selo. (2017b). Pengukuran E-Readiness Provinsi Gorontalo Dalam Penerapan Smart Government. Prosiding Seminar Nasional GEOTIK, 176–187.
- Nugroho, D. R. (2012). public policy. jakarta: elix media komputindo.
- Pasolong, H. (2007). kepemimpinan birokrasi. bandung: alfabeta.
- Patma, T. S. et al. (2019). Pengantar Manajemen. malang: polinema press. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17567.48800>
- Prabowo, H. et al. (2022). Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publik. bandung: PT Remaja rosdakarya. <https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.823>
- Pramono, S. E. (2022). Kajian Kesiapan (E-Readiness) Kecamatan Dalam Penerapan E-Government Kota Semarang. Jurnal Riptek, 15(2), 8–18. <https://doi.org/10.35475/riptek.v15i2.131>
- Putri, M. R. R., Sukarno, D., & Halim, H. A. (2022). E-Readiness Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Keterangan Rencana Kota (Krk) Online. JANE - Jurnal Administrasi Negara, 13(2), 217. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28692>
- Rahayu, A. Y. . dan V. J. (2022). birokrasi & governance teori, konsep dan aplikasi. depok: rajawali press.
- Rahmah, R., Winarno, W. W., & Santosa, P. I. (2014). Model Pengukuran E-Readness Penerapan Blueprint E-Government Guna Meningkatkan Pelayanan Publik. Seminar nasional Ilmu Komputer.
- Ratminto et al. (2005). Manajemen pelayanan: pengembangan model konseptual, penerapan citiizen's charter dan standar pelayanan minimal. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Robbins, S. P. (1994). teori organisasi. (Arcan, Ed.). bandung.
- Sinambela, P. L. (2006). reformasi pelayanan publik. jakarta: PT Bumi Aksara.
- Stoner, J. A. . (1996). management. terjemahan. jakarta: alexander sindoro, preshallindo.

- Sugiyono. (2008). metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. bandung: alfabeta.
- Sururi, A. (2017a). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 14. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16236>
- Sururi, A. (2017b). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris). Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 4(3), 1–14. <https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241>
- Sutrisno, E. (2009). manajemen sumber daya manusia (pertama). jakarta: kencana.
- Suwarno, Y. (2008). inovasi di sektor publik. jakarta: STIA-LAN press.
- Syafie, inu kencana. (2010). ilmu administrasi publik. jakarta: rineka cipta.
- Tresiana, N. dan N. D. (2018). pengantar ilmu administrasi publik. bandar lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Venkatraman, N. (1994). IT-enabled business transformation: From automation to business scope redefinition. Sloan Management Review, 35(2), 73–87.
- Widanti, ni putu tirka. (2022). prinsip administrasi publik. denpasar: jagat langit sukma.

Regulasi / Undang-Undang

- Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Tentang Pengembangan E-Government
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika (Telekomunikasi, Media Dan Informatika) Di Indonesia
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika Bab II Pasal 4 ayat 1 dan 2
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (Wireless) Pada Program Kewajiban Pelayanan Publik yang pada BAB III pasal 2 ayat 1
- Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Pasal 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 10